

Catatan Rekomendasi Strategi MEMBANGUN SISTEM PANGAN BERKELANJUTAN KOTA YOGYAKARTA

photo: pixabay.com

Ucapan Terima Kasih

Dokumen ini merupakan rangkuman dari catatan kegiatan wawancara mendalam, survey dan diskusi yang melibatkan pelaku dan pemangku kepentingan sistem pangan di Kota Yogyakarta selama periode tahun 2019 - 2021. Hivos mengucapkan terima kasih kepada nara sumber dan kontributor yang telah membantu dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan proyek Local Harvest di Kota Yogyakarta.

Penulis:

MH. Setiawan

M. Rianto Utama

Miranda

Kontak:

Hivos/Konsorsium Local Harvest

Email: sea@hivos.org

www.panganbijak.org



PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pangan merupakan salah satu elemen penting dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya terkait TPB 2 yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan 5 target yang diukur melalui 20 indikator. Target-target tersebut terdiri dari: (a) menghilangkan kelaparan dan kekurangan gizi; (b) menggandakan produktivitas pertanian; (c) menjamin pertanian pangan berkelanjutan; (d) mengelola keragaman genetik, dan (e) meningkatkan kapasitas produktif pertanian.

Masalah pangan merupakan hal yang kompleks karena tidak hanya menyangkut bagaimana pangan diproduksi, namun juga mencakup berbagai aspek lainnya mulai dari plasma nutfah sumber pangan, lahan untuk produksi pangan, prosesing, logistik dan distribusi, konsumsi, hingga paska konsumsi (sampah makanan) yang melibatkan pelaku dan pemangku kepentingan pangan yang berbeda-beda. Untuk mencapai kondisi yang diharapkan, perlu ditetapkan sebuah visi yang dibangun dan disepakati oleh pelaku dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam sebuah sistem pangan. Pendekatan sistem digunakan untuk melihat keterkaitan antara satu aspek dengan aspek lain serta memastikan bahwa seluruh komponen saling berinteraksi secara positif untuk mencapai tujuan pembangunan pangan. Melalui pendekatan sistem pangan diharapkan dapat dibangun sebuah perencanaan pangan berkelanjutan yang melingkupi seluruh aspek pangan, yang disepakati dan dijalankan secara bersama-sama oleh pelaku dan pemangku kepentingan terkait, saling berkoordinasi dan bersinergi untuk mencapai tujuan dan visi bersama.

Dalam konteks kota, ketersediaan pangan perkotaan yang terjangkau dipengaruhi oleh berbagai komponen rantai pasok pangan yang panjang dan satu sama lain

saling berkaitan. Sistem pangan perkotaan melibatkan banyak pelaku dan kegiatan mulai proses produksi sampai konsumsi yang dilaksanakan dari wilayah perdesaan, pinggiran kota dan perkotaan. Kota Yogyakarta yang berpenduduk sekitar 415 ribu jiwa tidak terlepas dari tantangan yang terjadi dalam sistem pangan perkotaan, diantaranya keterbatasan lahan produksi pangan. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan berbagai upaya dan inovasi untuk menjaga agar ketersediaan pangan tetap stabil dan dapat memenuhi kebutuhan gizi masyarakat melalui berbagai program yang diikuti oleh partisipasi dan inisiatif masyarakatnya.

Proyek SWITCH Asia Local Harvest: mempromosikan konsumsi berkelanjutan dan merata serta sistem pangan lokal di Indonesia didukung oleh Uni Eropa dan diimplementasikan oleh Hivos dan mitranya: AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), ASPPUK (Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil), NTFP-EP (Non Timber Forest Product-Exchange Program) Indonesia dan WWF Indonesia. Proyek ini dilaksanakan di 8 provinsi (14 kabupaten) dan 5 kota di Indonesia, termasuk Kota Yogyakarta selama periode empat (4) tahun terhitung sejak 1 Maret 2018. Tujuan khusus dari proyek ini adalah untuk merangsang pergeseran pola konsumsi yang signifikan terhadap produk makanan yang berkelanjutan dan bersumber secara etis di Indonesia melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran konsumen tentang dampak pilihan makanan mereka; peningkatan kapasitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan produsen pangan - termasuk perempuan dan masyarakat adat - untuk menembus pasar; lingkungan kebijakan yang menguntungkan untuk penyerapan praktik Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan di sektor pangan. Salah satu bidang hasil proyek ini meliputi dukungan dan adopsi dari pemerintah nasional dan daerah tentang kebijakan dan pedoman untuk mempromosikan produk pangan hijau, sehat, adil dan lokal.

Forum/platform multi pihak merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan dalam rangka memperkuat kerjasama dan sinergi untuk mendukung sistem pangan di Kota Yogyakarta yang berkelanjutan. Platform pemangku kepentingan lokal mencakup, tetapi tidak terbatas pada lembaga pemerintah, perwakilan produsen, UMKM dan pengecer, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan perwakilan konsumen, yang akan berbagi pengalaman dan mendiskusikan potensi sinergi dalam mempromosikan konsumsi dan produksi berkelanjutan dalam sistem pangan.



2. Kota Yogyakarta

Sumber: <https://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=aff8a31acc4342c191004bc9c4eb84cb>

5

pengunjung wisata di Kota Yogyakarta pada tahun 2020 turun sebesar 69,98 % dari tahun 2019.

Kota Yogyakarta memiliki luas sekitar 32,5 Km² atau 1,02 % dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta¹. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 jumlah penduduk Kota Yogyakarta tercatat 373.589 jiwa dengan komposisi 48,72% laki-laki dan 51,28% perempuan. Secara administratif Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan. 14 Kecamatan tersebut adalah:

1. Kecamatan Mantrijeron

Kecamatan Mantrijeron memiliki luas wilayah 2,61 km². Jumlah penduduk kecamatan ini adalah sebesar 33.748 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,63% di tahun 2021.

2. Kecamatan Kraton

Kecamatan Kraton memiliki luas wilayah 1,40 km² atau 4% dari keseluruhan luas Kota Yogyakarta. Kecamatan ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 18.097 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,15% pada tahun 2021.

3. Kecamatan Mergangsan

Luas wilayah kecamatan Kecamatan Mergangsan ini adalah 2,31 km². Prosentase luas tersebut terhadap seluruh Kota Yogyakarta adalah sekitar 7%. Dalam hal pertumbuhan penduduk, Kecamatan Mergangsan mencatat pertumbuhan 0,80% antara tahun 2020 dan 2021.

4. Kecamatan Umbulharjo

Luas wilayah Kecamatan Umbulharjo adalah 8,12 km². Kecamatan ini adalah kecamatan dengan luas terbesar atau sekitar 25% dari wilayah Kota Yogyakarta. Dengan jumlah penduduk 68.576 jiwa, Umbulharjo juga merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar di Kota Yogyakarta. Laju pertumbuhan penduduknya nya pada tahun 2021 adalah 0,79%.

5. Kecamatan Kotagede

Kecamatan Kotagede memiliki luas wilayah sebesar 3,07 km persegi. Jumlah penduduk Kotagede pada tahun 2021 adalah 33.694 jiwa dan memiliki laju pertumbuhan penduduk yang tergolong tinggi yaitu sebesar 1,66% di tahun 2021

¹ Sumber: Yogyakarta dalam Angka 2022



6. Kecamatan Gondokusuman

Kecamatan Gondokusuman memiliki luas wilayah sebesar 3,99 km² dengan jumlah penduduk sebesar 37.142 jiwa. Jumlah penduduk ini adalah kedua terbesar setelah Kecamatan Umbulharjo. Kecamatan ini mencatatkan laju pertumbuhan negatif sebesar 1,96% sepanjang tahun 2010 – 2020, namun mencatat pertumbuhan positif sebesar 0,80% pada tahun 2021.

7. Kecamatan Danurejan

Kecamatan Danurejan memiliki luas wilayah sebesar 1,10 km². Kecamatan ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 18.814 jiwa dan laju pertumbuhan penduduknya pada tahun 2021 adalah sebesar 1,03%.

8. Kecamatan Pakualaman

Kecamatan Pakualaman merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu 0,63 km persegi atau sekitar 2% dari seluruh wilayah Kota Yogyakarta, Jumlah penduduk Kecamatan Pakualaman adalah 9.203 jiwa, terkecil diantara seluruh kecamatan, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,80% pada tahun 2021.

9. Kecamatan Gondomanan

Luas wilayah Kecamatan Gondomanan adalah 1,12 km² atau sebesar 4% dari keseluruhan luas wilayah Kota Yogyakarta. Jumlah penduduk di kecamatan ini adalah sebanyak 12.869 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 0,79%.

10. Kecamatan Ngampilan

Kecamatan ini memiliki luas wilayah sebesar 0,82 km². Jumlah penduduknya sebesar 15.450 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,80% pada tahun 2021

11. Kecamatan Wirobrajan

Luas wilayah kecamatan ini adalah 1,76 km² dengan jumlah penduduk di tahun 2021 sebanyak 24.887 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Wirobrajan adalah 0.80%, lebih besar dibanding laju pertumbuhan selama 2010 – 2020 (-0,04%)

12. Kecamatan Gedongtengen

Kecamatan Gedongtengen memiliki luas sebesar 0,96 km² atau sebesar 3% dari keseluruhan luas Kota Yogyakarta. Kecamatan ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 16.582 jiwa, dengan pertumbuhan penduduk sebesar 0,79% pada tahun 2021.



13. Kecamatan Jetis

Kecamatan Jetis memiliki luas wilayah sebesar 1,70 km². Wilayah ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 23.525 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,80% pada tahun 2021.

14. Kecamatan Tegalrejo

Secara luas wilayah, Tegalrejo memiliki prosentase sebesar 5% dari total Kota Yogyakarta (2,91 km²). Jumlah penduduk di Kecamatan Tegalrejo adalah 34.826 jiwa, dan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0.80% berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021.

3. Metodologi Pengumpulan Data

Dokumen catatan rekomendasi strategi sistem pangan Kota Yogyakarta ini merupakan rangkuman hasil wawancara dan diskusi dengan pelaku dan pemangku kepentingan sistem pangan Kota Yogyakarta yang dilakukan melalui berbagai kegiatan sepanjang tahun 2019 – 2021.

Mengingat luas Kota Yogyakarta yang relatif kecil, maka kegiatan juga melibatkan para pelaku dan pemangku kepentingan pangan yang berada di wilayah sekitar Kota Yogyakarta, seperti kabupaten Sleman dan Bantul.

a. Pemetaan Pemangku Kepentingan Sistem Pangan Kota Yogyakarta

Kegiatan pemetaan pemangku kepentingan sistem pangan Kota Yogyakarta dilaksanakan selama bulan Januari – Maret 2019 melalui interview mendalam kepada 27 orang responden. Tujuan dari kegiatan pemetaan ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai situasi sistem pangan Kota Yogyakarta, aktor dan pemangku kepentingan yang terlibat didalamnya, serta forum forum terkait pangan yang telah berjalan. Hasil pemetaan ini akan digunakan sebagai basis untuk melakukan komunikasi awal dengan pihak pihak terkait dalam rangka pembentukan atau penguatan forum pemangku kepentingan sistem pangan di Kota Yogyakarta.

b. Survey Cepat Adaptasi Rantai Pasok Pangan di Masa Pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta

Kegiatan survey cepat adaptasi rantai pasok pangan di masa pandemi Covid-19



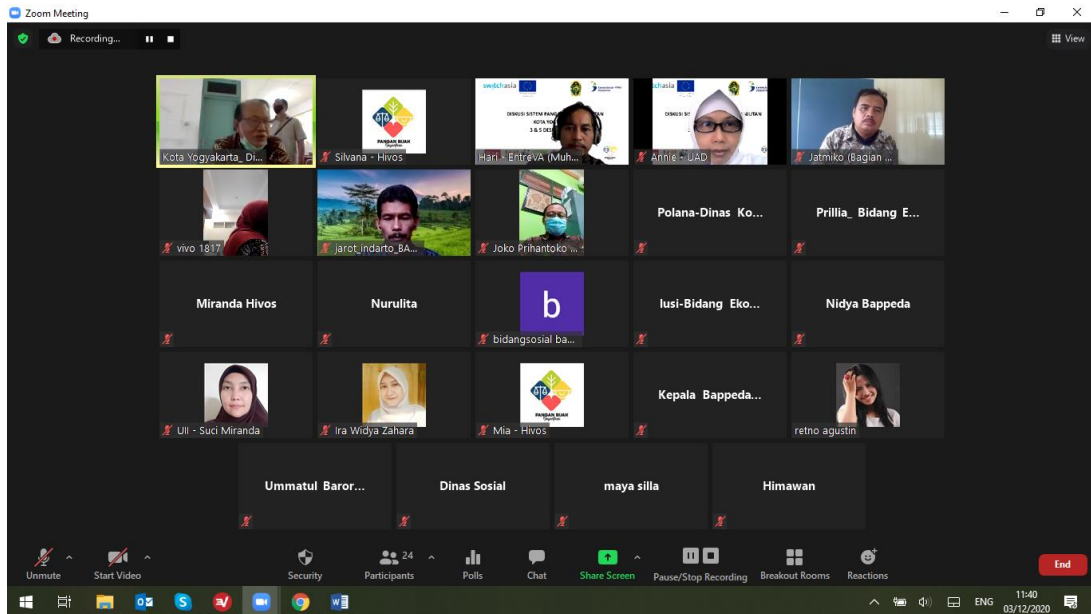
merupakan inisiatif yang dilakukan bersama antara pemerintah Kota Yogyakarta, akademisi dari 4 perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta serta Hivos. Survey cepat yang dilakukan pada bulan Mei - Juli 2020 ini bertujuan untuk memotret perubahan yang terjadi pada rantai pasok pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta selama pandemi Covid -19 serta adaptasi yang telah dilakukan oleh para pelaku pangan untuk mengurangi dampak dan resiko negatif akibat pandemi. Survey dilaksanakan secara online dengan menjawab 25 pertanyaan pada *Google Form* yang disebarakan melalui e mail maupun Whatsapp kepada pelaku rantai pasok pangan di Kota Yogyakarta dan sekitarnya. Hasil survey telah dipresentasikan pada diskusi forum pemangku kepentingan Kota Yogyakarta pada bulan Desember 2020.

c. Seri Diskusi Sistem Pangan Berkelanjutan Kota Yogyakarta

Seri diskusi dengan pemangku kepentingan sistem pangan Kota Yogyakarta dilakukan untuk mendalami isu isu pangan yang ada di Kota Yogyakarta, termasuk dampak dari pandemi Covid 19. Selain itu diskusi ini diharapkan dapat menjadi media untuk berbagi informasi, memperkuat koordinasi serta menjaring masukan dari berbagai pihak mengenai solusi yang dapat dilakukan bersama untuk mendukung terciptanya sistem pangan Kota Yogyakarta yang berkelanjutan, adil dan tangguh. Karena situasi pandemi Covid 19, maka seri diskusi sistem pangan Kota Yogyakarta dilaksanakan secara daring melalui platform zoom sebanyak tiga kali pertemuan yaitu :

- Tanggal 3 Desember 2020 bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sistem pangan
- Tanggal 5 Desember 2020 bersama akademisi dan sektor swasta terkait sistem pangan
- Tanggal 16 September 2021 bersama pemangku kepentingan kegiatan pertanian perkotaan Kota Yogyakarta





Kegiatan diskusi daring pemangku kepentingan sistem pangan Kota Yogyakarta

d. Wawancara mendalam dengan pelaku sistem pangan terpilih

Untuk mendalami isu spesifik dalam sistem pangan Kota Yogyakarta, dilakukan wawancara mendalam dengan beberapa pelaku dan pemangku kepentingan sistem pangan terkait topik pertanian perkotaan.

SITUASI SISTEM PANGAN KOTA YOGYAKARTA

1. Kondisi Aktual Sistem Pangan Kota Yogyakarta

Berdasarkan data yang terkumpul dari berbagai kegiatan yang melibatkan pihak- pihak yang terkait sistem pangan Kota Yogyakarta, kondisi sistem pangan Kota Yogyakarta dapat dibagi menjadi empat kelompok:

a. Ketersediaan Pangan

Dalam hal ketersediaan pangan, Kota Yogyakarta menggantungkan sebagian besar kebutuhan pangannya pada wilayah produksi di luar Kota Yogyakarta. Keterbasan luas lahan serta konversi lahan merupakan isu yang mempengaruhi ketersediaan pangan Kota Yogyakarta. Penggunaan lahan di Kota Yogyakarta mayoritas diperuntukkan bagi perumahan. Dari total luas lahan di Kota Yogyakarta, hanya 53 hektar saja yang berupa lahan sawah, selebihnya adalah lahan bukan sawah. Luas lahan sawah terbesar ada di wilayah Umbulharjo seluas 32 hektar. Selain sawah, ketersediaan pangan Kota Yogyakarta juga ditopang oleh kegiatan pertanian perkotaan. Berdasarkan data BPS tahun 2020, tanaman pangan yang ada di Kota Yogyakarta meliputi padi, sayuran dan buah-buahan. Tanaman pangan jenis sayuran yang diproduksi di Kota Yogyakarta diantaranya bayam, cabai rawit, kangkung, sawi, terong dan tomat. Sementara itu produksi perikanan di Kota Yogyakarta pada tahun 2020 yang berasal dari kolam adalah sebesar 42,87 ton, mengalami kenaikan sebesar 1,84 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Ikan yang paling banyak dibudidaya di Kota Yogyakarta adalah ikan lele dan ikan nila.



Walaupun program pertanian perkotaan telah dilaksanakan secara cukup intensif di wilayah Kota Yogyakarta, namun masih terkendala beberapa hal diantaranya ketersediaan media tanam dan pupuk organik yang relatif masih minim, kurangnya minat generasi muda untuk menekuni sektor pertanian, serta belum adanya model bisnis yang dapat mendukung keberlanjutan kegiatan pertanian perkotaan.

Secara umum, ketersediaan pangan pokok (beras, jagung, cabai, daging) di Kota Yogyakarta hingga bulan Nopember 2020 relatif cukup dengan harga yang kompetitif bagi produser dan terjangkau oleh masyarakat. Hingga saat ini pemerintah Kota Yogyakarta belum memiliki kerjasama formal dengan daerah penghasil pangan di luar Kota Yogyakarta karena selama ini distribusi pangan dari daerah produksi pangan tidak mengalami kendala. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam urusan ketersediaan pangan di Kota Yogyakarta diantaranya: Dinas Pertanian (produksi) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (stok, distribusi, pasar). Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga terlibat dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Yogyakarta dan TPID propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tim TPID kota akan berkoordinasi dengan tim TPID propinsi bila terjadi lonjakan atau kekosongan stok bahan pokok, karena Kota Yogyakarta bukan daerah penghasil pangan.

b. Konsumsi dan Status Gizi

Berdasarkan data dari Dinas Pangan dan Pertanian Kota Yogyakarta, skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Yogyakarta pada tahun 2020 mencapai 94.3%, diatas target yang ditetapkan yaitu 87.5%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas konsumsi pangan masyarakat Kota Yogyakarta secara umum sudah cukup baik dan berimbang. Skor untuk konsumsi sayur dan buah adalah 30% dan setiap tahun meningkat karena dampak dari program Gebyur (gerakan konsumsi buah dan sayur) dan Gempal (gerakan mengolah konsumsi pangan lokal) yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

Dalam hal status gizi, berdasarkan data BPS pada tahun 2020, presentase jumlah balita dengan gizi buruk di Kota Yogyakarta adalah sebesar 0,90%, turun dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 1.30%, seperti terlihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 4.2.13 **Persentase Jumlah Balita menurut Status Gizi di Kota Yogyakarta, 2017-2021**
Table **Percentage of under Five-Year-Old Children by Nutrition in Yogyakarta Municipality, 2017-2021**

Status Gizi Nutrition Status		2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Gizi Buruk Undernourished	0,80	0,92	0,88	1,3	0,90
2.	Gizi Kurang Malnourished	7,60	7,61	7,58	5,8	5,65
3.	Gizi Normal Normal	87,56	87,8	88,27	75,8	77,65
4.	Gizi Lebih Overnourished	4,04	3,67	3,27	17,1	15,80
Jumlah/Total		100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
Source : Health Service Office of Yogyakarta Municipality

Peraturan Walikota No.51/2010 tentang petunjuk pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal merupakan basis bagi pemerintah dalam melaksanakan langkah-langkah operasional dan penganekaragaman konsumsi pangan, antara lain melalui kampanye, pendidikan, konsumsi pangan, penyuluhan, pemanfaatan pekarangan, serta penerapan standar mutu dan keamanan pangan pada UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

c. Keamanan Pangan

Berdasarkan hasil diskusi pemangku kepentingan sistem pangan Kota Yogyakarta, aspek keamanan pangan dianggap perlu mendapatkan perhatian khusus mengingat Kota Yogyakarta merupakan salah satu tujuan wisata di Indonesia. Salah satunya adalah terkait aspek mikrobiologi, misalnya bakteri patogen dalam susu yang dijual oleh pedagang kaki lima (PKL). Salah satu universitas di Yogyakarta, Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) telah

melakukan penelitian sebagai dasar untuk merancang *thermal death time*, yaitu suhu dan waktu yang paling tepat untuk mematikan bakteri, agar susu yang dijual oleh PKL aman untuk dikonsumsi. Penelitian juga mencakup makanan jajanan pasar seperti cilok, siomay, bakso tusuk dan minuman tradisional. Namun untuk implementasinya, selain dukungan kebijakan dan teknologi, juga dibutuhkan peningkatan wawasan dan pendekatan khusus kepada UMKM dan PKL sebagai penyedia makanan olahan sehingga mereka tidak melihat aspek keamanan pangan sebagai sebuah peraturan yang membebani, namun sebagai keuntungan dan nilai tambah untuk bisnis mereka. Saat ini pemerintah Kota Yogyakarta telah memiliki alat dan laboratorium uji untuk memastikan keamanan dan kehalalan pangan di Kota Yogyakarta.

d. UMKM Pangan

Berdasarkan data dari Dinas UMKM Kota Yogyakarta, jumlah UMKM yang ada di Kota Yogyakarta pada tahun 2017 adalah sekitar 26,000 UMKM, dan sebagian besar (60-70%) merupakan UMKM kuliner. Keamanan pangan, sampah organik dan non organik hasil kegiatan usaha UMKM dan akses pasar terutama saat pandemi Covid 19 merupakan isu-isu terkait UMKM yang mengemuka pada diskusi pelaku dan pemangku kepentingan sistem pangan Kota Yogyakarta.

Situasi Pandemi Covid 19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 memaksa sebagian pelaku usaha untuk menggunakan platform digital, termasuk media sosial. Berdasarkan survei cepat yang dilakukan di Yogyakarta, di masa pandemi penggunaan platform digital naik dari 27.5% ke 33.3%. Terlepas dari situasi pandemi, Pemerintah Kota Yogyakarta juga telah memanfaatkan teknologi informasi untuk melalui platform e-warung, larisi, e-dodolan untuk mendukung digitalisasi dan akses pasar untuk mendukung UMKM pangan. Beberapa strategi dan program pembinaan dari dinas UMKM Kota Yogyakarta diantaranya: peningkatan kapasitas UMKM terkait digitalisasi pemasaran, promosi di stasiun televisi nasional dan lokal, mengkaji kemungkinan kerjasama dengan Gojek/Go-food.

Terkait keamanan pangan, masih diperlukan sosialisasi dan peningkatan wawasan dan kapasitas UMKM dalam mengolah dan menjual produk pangan



mereka. Aspek keamanan pangan seyogyanya merupakan bagian dari standard operasi UMKM pangan dan dipersepsikan sebagai nilai tambah yang dapat memberikan keuntungan bagi bisnis mereka.

Sampah kemasan dari produk UMKM yang mayoritas menggunakan plastik disebut dapat menyebabkan masalah lingkungan oleh salah satu peserta diskusi forum multi pihak sistem pangan. Adanya bank sampah di beberapa wilayah di Kota Yogyakarta berkontribusi pada pengurangan jumlah sampah plastik tersebut, namun tidak dapat mengejar tingkat konsumsi yang ada. Oleh karena itu perlu didorong penggunaan kemasan yang lebih ramah lingkungan di tingkat UMKM.

2. Intervensi dan Inovasi Sistem Pangan Kota Yogyakarta

Beberapa intervensi dan inovasi terkait sistem pangan yang telah dilakukan di Kota Yogyakarta yaitu:

a. Pertanian Perkotaan

Untuk menjawab permasalahan ketersediaan pangan, kualitas konsumsi pangan dan ketahanan gizi masyarakat, pemerintah Kota Yogyakarta telah mengembangkan program pertanian perkotaan. Inisiatif/embrio pertanian perkotaan di Kota Yogyakarta dimulai sejak 2018 bersama Kelompok Tani Tanem Tuwuh. Kegiatan pertanian perkotaan di Kota Yogyakarta berfokus pada ketahanan gizi keluarga dan komunitas. Kondisi pandemi Covid 19 secara tidak langsung telah menstimulasi perluasan kegiatan pertanian perkotaan. Karangwaru Riverside - merupakan salah satu contoh praktik baik pertanian perkotaan di Kota Yogyakarta yang mengintegrasikan pertanian perkotaan dengan wisata. Di wilayah lain, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Bausasran menerapkan pertanian vertikultur, dimana tembok-tembok dijadikan media tanam dengan *wall planter bag*, juga pot-pot yang menempel di tembok dan pot-pot gantung sehingga masyarakat merasa nyaman dan dapat memanen hasilnya. Diharapkan kampung Bausasran dapat menjadi kampung yang edukatif, sebagai kampung sayur di tengah-tengah perkotaan.

Pemerintah Kota Yogyakarta mengalokasikan anggaran cukup besar untuk pertanian perkotaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



(APBD) perubahan tahun 2019 hingga tahun 2021, dan memiliki rencana pengembangan pertanian perkotaan, tidak hanya sebagai sumber pangan dari pertanian terintegrasi (sayur, lele, kebun bibit, rumah maggot), namun juga terintegrasi dengan edukasi dan wisata di Kota Yogyakarta.

Pusat Inovasi Agroteknologi (PIAT) Universitas Gadjah Mada merupakan salah satu pemangku kepentingan dari kalangan akademisi yang mendukung pertanian perkotaan dalam hal: penyediaan benih (bank genetik sayuran lokal) dan pupuk, asistensi budidaya, packaging dan marketing. PIAT juga memiliki fasilitas RINDU (Rumah Inovasi Daur Ulang) untuk memproduksi pupuk kompos dan media tanam yang aman untuk budidaya tanaman.



Presentasi 5K pada kegiatan diskusi daring pemangku kepentingan sistem pangan Kota Yogyakarta

Untuk mendukung pemasaran daring hasil pertanian perkotaan, pemerintah Kota Yogyakarta bekerjasama dengan asosiasi pemerintah - pemerintah kota/regional se-Asia Pasifik (*United Cities and Local Government - Asia Pacific /UCLG ASPAC*), yang memfasilitasi terbentuknya sebuah platform digital "Panen Apa Hari Ini" yang berfungsi sebagai media edukasi bagi masyarakat serta informasi dan penjualan hasil pertanian perkotaan di Kota Yogyakarta. Dalam hal konsumsi pangan, Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) sebagai salah satu pemangku kepentingan sistem pangan Kota Yogyakarta membentuk dan melatih kelompok konsumen untuk sadar dan kritis terhadap apa yang mereka konsumsi, serta mendorong masyarakat untuk menyuarakan kepentingannya misalnya terkait kebijakan yang dapat

melindungi masyarakat untuk mendapatkan pangan yang sehat dan aman. YLK juga memberikan pelatihan memasak pangan lokal bagi masyarakat.

b. Program Gandeng Gendong

Program Gandeng Gendong merupakan sebuah program yang diinisiasi oleh pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengentaskan kemiskinan di wilayahnya. Program ini dimulai sejak tahun 2016 dan diperkuat dengan terbitnya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2018 tentang Program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta. Gandeng Gendong merupakan program inovatif dan termasuk dalam *collaborative governance* karena pelaksanaannya melibatkan unsur 5K yaitu Kota, Kampus, Korporasi, Kampung, dan Komunitas. Kata 'gandeng' bermakna bahwa semua elemen masyarakat saling bergandengan tangan dengan niat saling membantu agar semua pihak dapat maju bersama. Sedangkan kata 'gendong' memiliki makna masyarakat membantu warga lain yang tidak mampu berjalan.

Melalui program Gandeng Gendong Pemerintah Kota Yogyakarta telah memberikan kesempatan dan memberdayakan kelompok - kelompok UMKM di wilayah Kota Yogyakarta untuk menjadi penyedia jamuan makan dan minum dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Yogyakarta. Selain juga misalnya Pemerintah Kota Yogyakarta meminta hotel-hotel agar bisa menyerap produk kuliner dan kerajinan dari masyarakat yang ada disekitar hotel.

c. Kerjasama Multi Pihak

Pemerintah Kota Yogyakarta meyakini bahwa pembangunan pangan harus didasarkan pada kerjasama multipihak untuk menjamin keberhasilan dan keberlanjutannya. Oleh karena itu pemerintah kota melibatkan 5K: Kota, Kampus, Korporasi, Komunitas, Kampung dalam dalam pelaksanaan program programnya. Berdasarkan hasil pemetaan sistem pangan yang dilakukan, ada beberapa forum multi pihak terkait sistem pangan yang telah terbentuk dan berjalan di Kota Yogyakarta diantaranya:

- Forum Ketahanan Pangan
Forum ini dibentuk dan dikoordinasikan oleh Dinas Pertanian Kota Yogyakarta. Forum ini bersifat informal dan melibatkan OPD terkait pangan



di Kota Yogyakarta seperti: Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPKB), Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA)

- Forum Komunikasi Kuliner Indonesia (Forkomkulindo)

Forum ini diinisiasi oleh akademisi dari jurusan teknologi pangan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan didukung oleh Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF). Anggota forum ini terdiri dari perwakilan pemerintah sektor swasta, asosiasi, komunitas, akademisi dan media. Forum ini merupakan media bertukar informasi dan pengalaman terkait ekonomi kreatif sektor kuliner, serta promosi kuliner Indonesia di level lokal, nasional dan internasional.

- Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG)

Merupakan forum multi pihak yang dibentuk oleh pemerintah dalam rangka penyusunan rencana pembangunan, mulai dari tingkat desa hingga kota. Forum ini melibatkan institusi pemerintah, sektor swasta, asosiasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, lembaga pengetahuan/riset, para ahli dan pemimpin wilayah, serta kelompok marjinal termasuk didalamnya perempuan dan penyandang disabilitas.



REKOMENDASI SISTEM PANGAN BERKELANJUTAN KOTA YOGYAKARTA

1. **Mengimplementasikan konsep ekonomi sirkular dalam sistem pangan di Kota Yogyakarta.**

Ekonomi sirkular merupakan sebuah konsep dimana dimana pelaku ekonomi menjaga agar sumber daya dapat dipakai selama mungkin, menggali nilai maksimum dari penggunaan, kemudian memulihkan dan meregenerasi produk dan bahan pada setiap akhir umur layanan. Konsep ini dapat dapat diterapkan pada program pertanian perkotaan yang telah berkembang di Kota Yogyakarta. Model pertanian terpadu yang dapat mengoptimalkan lahan sempit di perkotaan serta pemanfaatan limbah organik pertanian perkotaan sebagai pupuk perlu lebih digiatkan. Tidak hanya di sisi produksi namun konsep ini perlu diintegrasikan dengan aspek konsumsi, baik di tingkat rumah tangga (pemisahan sampah organik dan non organik rumah tangga) maupun di tingkat UMKM mengingat 60- 70% UMKM di Kota Yogyakarta merupakan UMKM kuliner. Sistem dan peningkatan kapasitas untuk pencegahan/mengurangi sampah makanan idealnya dimulai dari titik kritis bagaimana terjadi sampah makanan, apa yang harus dilakukan jika sudah terjadi. Kebijakan dan program yang mendukung penerapan ekonomi sirkular seperti manajemen imbah, pengembangan kemasan ramah lingkungan, penggunaan bahan pangan lokal perlu ditingkatkan.



Pola konsumsi pangan sangat ditentukan oleh pengetahuan, budaya, persepsi dan gaya hidup masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan promosi masif dan edukasi masyarakat untuk melakukan transformasi agar konsumsi pangan yang lokal, beragam, bergizi seimbang, aman dan bertanggung jawab dapat menjadi gaya hidup yang menular di masyarakat. Beberapa intervensi yang dapat dilakukan untuk mendukung transformasi ini adalah kampanye dan edukasi masyarakat, riset, promosi dan inovasi olahan bahan pangan lokal, sehat, lestari (gastronomi), peningkatan kapasitas pelaku sistem pangan serta pemberian insentif bagi usaha penyedia pangan lokal, sehat dan lestari.

4. Memperkuat kerjasama multipihak untuk mewujudkan sistem pangan Kota Yogyakarta yang berkelanjutan, sehat, adil dan tangguh

Kemitraan multi pihak merupakan aspek penting dalam kerangka pencapaian TPB tahun 2030. Kerjasama multi pihak diyakini dapat mengatasi masalah publik yang kompleks, multidimensional dan sistemik karena melibatkan berbagai sektor terkait, meningkatkan sinergi, efisiensi dan mengurangi duplikasi.

Pemerintah Kota Yogyakarta telah melibatkan 5K : Kota, Kampus, Korporasi, Komunitas, Kampung dalam dalam pelaksanaan program programnya. Implementasi dari prinsip ini dapat lebih diperkuat dan lebih inklusif dengan mengikutsertakan kelompok marjinal seperti kelompok perempuan, anak muda, petani dan penyandang disabilitas dalam proses-proses diskusi untuk pengambilan keputusan terkait pangan. Hal ini sejalan dengan prinsip TPB yaitu *"leave no one behind"*. Pelibatan anak muda sebagai aktor dalam sistem pangan sangat penting untuk regenerasi petani yang saat ini menjadi masalah global. Tentunya hal ini perlu disertai dengan peningkatan kapasitas pelaku dan pemangku kepentingan pangan, termasuk kapasitas dari petugas penyuluh lapangan. Kelompok perempuan memegang peranan penting dalam rantai nilai pangan, baik sebagai produser maupun pengolah makanan. Namun kelompok ini kerap diabaikan dalam proses proses diskusi, peningkatan kapasitas maupun pengambilan keputusan. Pengorganisasian dan peningkatan kapasitas perempuan dapat memberikan kontribusi besar dalam transformasi sistem pangan ke arah yang lebih berkelanjutan, sehat, adil dan tangguh.

